

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Umum CV. Karitama Jaya

CV. Karitama Jaya merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berdiri pada Februari 2023 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nama "Karitama Jaya" dipilih sebagai identitas entitas yang mencerminkan harapan akan kemajuan dan keberlanjutan dalam dunia usaha konstruksi lokal. Pendirian perusahaan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pemilik dalam bidang jasa konveksi dan percetakan, serta latar belakang keluarga yang aktif dalam dunia politik. Kombinasi pengalaman praktis dan koneksi politik tersebut menjadi landasan strategis untuk masuk ke sektor konstruksi, yang dinilai menjanjikan secara ekonomi dan berkelanjutan karena proyek pembangunan selalu hadir setiap tahunnya.

Perusahaan ini berbadan hukum CV (*Commanditaire Vennootschap*) dengan struktur kepemilikan terbagi atas komanditer sebagai investor utama dan direktur sebagai pelaksana. Dalam operasionalnya, perusahaan memberdayakan tenaga kerja lokal serta memfokuskan kegiatan usaha pada proyek-proyek pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD/APBN melalui mekanisme Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Visi dari CV. Karitama Jaya yaitu:

1. Menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan tepat guna.
2. Mewujudkan pertumbuhan usaha konstruksi yang berorientasi pada manfaat sosial dan akuntabilitas publik.

Misi dari CV. Karitama Jaya yaitu:

1. Melaksanakan proyek konstruksi dengan profesionalisme, transparansi, dan tepat waktu.
2. Menjaga kepatuhan terhadap standar teknis dan administrasi sesuai regulasi yang berlaku.

3. Meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas tenaga kerja lokal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Struktur organisasi internal perusahaan terdiri dari pemilik atau direktur, sedangkan staf administrasi, staf keuangan sekaligus monitor lapangan, dan staf pemasaran itu hanya di struktur organ. Pelaksana proyek direkrut dari masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan proyek dan tidak termasuk struktur organisasi tetap. Adapun uraian tugas dari masing-masing posisi adalah sebagai berikut



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi CV. Karitama Jaya

1. Pemilik/Direktur: Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha, termasuk pengambilan keputusan strategis, hubungan eksternal dengan pihak pemerintah dan investor, serta kontrol terhadap pelaksanaan proyek.
2. Staf Administrasi: Bertugas menyusun dan mengurus seluruh administrasi proyek, termasuk pembuatan surat pengajuan pencairan dana, penyiapan dokumen tender, dan pengarsipan dokumen SPK.
3. Staf Keuangan/Monitor Lapangan : Mengelola pencatatan pengeluaran proyek, memantau transaksi keuangan secara langsung di lapangan, serta mencatat aktivitas pembelanjaan sesuai SPK.
4. Staf Pemasaran: Bertanggung jawab dalam pencarian proyek dan menjalin komunikasi informal atau non-teknis dengan pihak pemberi kerja (instansi pemerintah), serta melakukan pendekatan awal dalam proses penawaran proyek.

Sebelum menyajikan hasil penelitian, perlu ditegaskan bahwa data yang digunakan telah melalui uji keabsahan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. CV. Karitama Jaya menjalankan operasionalnya secara pragmatis dan fleksibel, menyesuaikan dengan sifat dinamis proyek konstruksi pemerintah. Meskipun perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang fungsional, pembagian peran belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi yang formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan masih berpusat pada pemilik/direktur dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pelaporan terstandar. Praktik ini mencerminkan karakteristik umum UMKM sektor konstruksi yang cenderung mengutamakan kelancaran operasional proyek daripada tata kelola administratif berbasis sistem. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk memperkuat tata kelola internal melalui pembenahan struktur pelaporan dan implementasi sistem informasi akuntansi agar keberlanjutan dan transparansi usaha dapat terjaga.

B. Hasil Observasi

1. Praktik Penyusunan Laporan Keuangan CV. Karitama Jaya

CV. Karitama Jaya merupakan badan usaha yang bergerak di sektor jasa konstruksi dengan skala usaha mikro dan kecil. Dalam konteks operasionalnya, kegiatan pelaporan keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk menjamin keberlanjutan usaha, akuntabilitas, serta akses terhadap pembiayaan eksternal. Namun, sebagaimana banyak dijumpai pada UMKM lainnya, praktik penyusunan laporan keuangan di CV. Karitama Jaya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pencatatan yang belum terdokumentasi secara sistematis hingga keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 4. 1 Praktik penyusunan Laporan Keuangan

Wawancara	Analisis
<i>Kita masih mengacu pada SPK dulu, terus untuk laporan biaya</i>	Penyusunan laporan keuangan terlihat dalam perusahaan

<p><i>proyek dan arus kasnya itu berjalan karena SPK itu sebagai kontrak kerja kita. (K30)</i></p>	<p>membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang memuat kontrak kerja, rancangan anggaran</p>
<p><i>Kita hanya berdasarkan per-proyek/SPK, misalnya mengerjakan rehabilitasi Kecamatan Jatinunggal, maka laporan keuangannya hanya untuk proyek itu saja. (K32)</i></p>	<p>belanja, tahap-tahapan pembayaran, dan periode proyek yang berjalan, meskipun belum standar akuntansi. Yakni perusahaan belum mencatat operasional harian secara rutin,</p>
<p><i>Untuk pencatatan operasional kebetulan tidak sesering dan belum dicatat secara rutin karena kadang itu sekalian saja nantinya sama laporan yang di SPK. (K34)</i></p>	<p>pencatatan hanya berdasarkan proyek yang dikerjakan, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang dibuat hanya untuk kepentingan pelaporan pajak.</p>
<p><i>Tahun kemarin dan tahun ini belum ada laporan keuangan yang akuntabel dan lengkap dan kita hanya punya laporan keuangan yang mengacu pada efaktur pajak untuk laporan pajak tahunan lalu kita hanya mencatat anggaran per proyek saja belanja berapa dan tidak lengkap. (P20)</i></p>	
<p><i>Sebenarnya jika SPK sebagai acuan kondisi keuangan perusahaan itu tidak. (A64)</i></p>	
<p><i>Karena SPK itu hanya sebatas surat kontrak kerja saja dan itu hanya sebagai acuan proyek pekerjaan (A65)</i></p>	

Berdasarkan data hasil wawancara, CV. Karitama Jaya telah menyusun laporan keuangan secara sederhana, namun belum sepenuhnya mengikuti prinsip dan struktur yang ditetapkan dalam SAK EMKM. Penyusunan laporan keuangan dalam praktiknya masih berbasis proyek, di mana Surat Perintah Kerja (SPK) dijadikan acuan utama dalam mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan masing-masing proyek konstruksi yang dijalankan perusahaan. Namun demikian, aktivitas pencatatan tidak dilakukan secara rutin pada aktivitas operasional harian, dan dilakukan ketika proyek telah berjalan atau selesai. Sehingga tidak terpantau laporan laba rugi dalam satu periode akuntansi serta informasi keuangan yang dihasilkan masih terbatas pada lingkup proyek dan belum sepenuhnya dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, pencatatan transaksi keuangan dilakukan berdasarkan proyek, tanpa adanya konsolidasi atas keseluruhan aktivitas keuangan perusahaan dalam satu periode pelaporan tertentu. Misalnya, dalam pelaporan keuangan proyek rehabilitasi, informasi keuangan yang disajikan mencerminkan transaksi yang terjadi dalam proyek tersebut secara khusus, tanpa digabung dengan proyek lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan di CV. Karitama Jaya dilakukan berdasarkan masing-masing proyek yang sedang berjalan.

Praktik ini mencerminkan karakteristik umum UMKM sektor konstruksi yang berfokus pada pengelolaan proyek satu per satu, sebagai contoh, laporan keuangan untuk proyek rehabilitasi di Kecamatan Jatinunggal disusun secara terpisah, yang menggambarkan transaksi khusus pada proyek tersebut. Pendekatan ini memberikan kemudahan dalam memantau anggaran dan realisasi biaya per proyek, meskipun belum mencerminkan keseluruhan aktivitas keuangan perusahaan dalam satu periode pelaporan secara menyeluruh. Selain itu, pencatatan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang disusun oleh CV.

Karitama Jaya difokuskan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah diarahkan pada kebutuhan yang dianggap prioritas oleh perusahaan. Pemanfaatannya untuk keperluan internal, seperti evaluasi kinerja atau pengambilan keputusan. Berikut laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan sebagai dasar penyusunan E-Faktur dalam keperluan pelaporan pajakan:

LABA RUGI
CV. KARITAMA JAYA
TAHUN 2024

		Konstruksi	Pengadaan	Akumulasi
I PENDAPATAN				
1 I.1. DPP	Rp.	1,235,963,592	Rp. 1,484,964,703	Rp. 2,720,928,294
A Total Pendapatan (I.1b.)	Rp.	1,235,963,592	Rp. 1,484,964,703	Rp. 2,720,928,294
II BIAAYA				
1 Variable				
II.1a. Upah	Rp.	222,473,000	Rp.	Rp. 222,473,000
II.1b. Bahan	Rp.	679,779,000	Rp. 1,351,317,879	Rp. 2,031,096,879
II.1c. Alat	Rp.		Rp.	Rp. -
II.1d. Administrasi	Rp.	148,315,000	Rp. 74,248,235	Rp. 222,563,235
II.1e. PPh	Rp.	21,629,363	Rp. 22,274,471	Rp. 43,903,833
Total Biaya Variable	Rp.	1,072,196,363	Rp. 1,447,840,585	Rp. 2,520,036,948
2 Fix				
II.2a. ATK	Rp.	1,800,000	Rp.	Rp. 1,800,000
II.2b. Listrik	Rp.	2,400,000	Rp.	Rp. 2,400,000
II.2c. PDAM	Rp.	660,000	Rp.	Rp. 660,000
II.2d. Telepon	Rp.	2,400,000	Rp.	Rp. 2,400,000
II.2e. Transport	Rp.	1,800,000	Rp.	Rp. 1,800,000
II.2f. BPJS dan KTA	Rp.	13,750,000	Rp.	Rp. 13,750,000
II.2g. Upah Karyawan	Rp.	90,000,000	Rp.	Rp. 90,000,000
Total Biaya Fix	Rp.	112,810,000	Rp. -	Rp. 112,810,000
B Total Biaya	Rp.	1,185,006,363	Rp. 1,447,840,585	Rp. 2,632,846,948
C LABA KOTOR (A - II.1)	Rp.	163,767,229	Rp. 37,124,118	Rp. 200,891,346
D LABA BERSIH (A - B)	Rp.	50,957,229	Rp. 37,124,118	Rp. 88,081,346

Gambar 4. 2 Laporan Laba Rugi CV. Karitama Jaya

NERACA
CV. KARITAMA JAYA
TAHUN 2024

I ASET LANCAR		III LIABILITAS	
1 Kas	Rp. 20,000,000	1 Hutang Usaha	Rp. -
2 Bank	Rp. 50,000,000	2 Hutang Bank	Rp. -
3 Persediaan	Rp. -		
4 Piutang Usaha	Rp. -		
Total Aset Lancar	Rp. 70,000,000	Total Liabilitas	Rp. -
II ASET TETAP		IV EKUITAS	
1 Bangunan	Rp. 57,000,000	1 Modal	Rp. 150,000,000
2 Kendaraan	Rp. 15,000,000	2 Laba Jalan	Rp. -
3 Peralatan	Rp. 8,000,000		
4 Tanah	Rp. -		
Total Aset Tetap	Rp. 80,000,000	Total Ekuitas	Rp. 150,000,000
TOTAL ASET	Rp. 150,000,000	TOTAL LIABILITAS DAN MODAL	Rp. 150,000,000

Gambar 4. 3 Laporan Laba Rugi CV. Karitama Jaya

Berdasarkan dokumen laporan keuangan tersebut, terlihat bahwa laporan hanya digunakan sebagai pelengkap kewajiban perpajakan dan belum sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Temuan ini selaras dengan hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan masih berbasis proyek dengan mengacu pada SPK dan laporan biaya proyek, namun belum secara menyeluruh mengikuti ketentuan SAK EMKM. Berikut tabel triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai uji keabsahan data penelitian:

Fokus	Indikator	Direktur	Keuangan	Administrasi	Dokumen Pendukung	Hasil
Praktik Penyusunan Laporan Keuangan	Sistem pencatatan	Belum ada laporan keuangan akuntabel, hanya e-faktur pajak dan anggaran per proyek di SPK.	Pencatatan mengacu pada SPK dan per proyek.	SPK hanya kontrak kerja, bukan laporan keuangan.	SPK, nota, dan e-faktur pajak	Laporan keuangan masih sederhana dan berbasis proyek. SPK dijadikan acuan utama pencatatan, sedangkan laporan laba rugi dan posisi keuangan hanya dibuat untuk kebutuhan pajak. Aktivitas operasional harian belum dicatat rutin, sehingga informasi keuangan tidak mencerminkan posisi perusahaan secara keseluruhan.

Gambar 4. 4 Triangulasi Sumber Praktik Penyusunan Laporan Keuangan

Fokus	Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Hasil
Praktik Penyusunan Laporan Keuangan	Sistem pencatatan	Informan menyebut pencatatan berbasis SPK dan laporan sederhana sesuai templet untuk kebutuhan pelaporan pajak.	Pencatatan dilakukan manual per proyek, catatan harian belum dibuat secara rutin	Ditemukan SPK, nota, faktur, dan e-faktur pajak	Laporan keuangan berbasis proyek, difokuskan pada pajak, belum sesuai struktur SAK EMKM.

Gambar 4. 5 Triangulasi Teknik Praktik Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis wawancara, observasi, dokumentasi, serta uji keabsahan data melalui triangulasi, dapat disimpulkan bahwa praktik penyusunan laporan keuangan CV. Karitama Jaya masih bersifat sederhana dan berbasis proyek. Pencatatan transaksi keuangan mengacu pada SPK dan laporan biaya proyek, sementara laporan laba rugi dan neraca hanya dibuat untuk keperluan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan belum mampu menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, sehingga fungsinya masih terbatas pada administrasi proyek dan kewajiban fiskal.

2. Kesesuaian Laporan Keuangan CV. Karitama Jaya dengan Ketentuan yang Diatur dalam SAK EMKM

SAK EMKM yaitu standar akuntansi yang dirancang khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Standar ini disusun dengan pendekatan berbasis kas dan hanya terdiri atas tiga laporan utama, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tujuannya adalah agar pelaku usaha tetap dapat menyajikan informasi keuangan yang akuntabel dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, meskipun dengan sistem pencatatan yang sederhana (IAI, 2016). Namun demikian, efektivitas penerapan SAK EMKM sangat bergantung pada sejauh mana pelaku usaha memahami isi dan tujuan dari standar tersebut.

Tabel 4. 2 Kesesuaian Laporan Keuangan CV. Karitama Jaya

Wawancara	Analisis
<i>Karena kebanyakan satu kontrak kerja itu bersama pemerintahan jadi untuk laporan biaya proyek dan arus kas ini mengikuti SPK tersebut serta kebutuhan di lapangan serta operasional hanya dicatat sesuai SPK (K31)</i>	Penyusunan laporan keuangan terlihat dalam perusahaan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang memuat kontrak kerja, rancangan anggaran belanja, tahap-tahapan pembayaran, dan periode proyek yang berjalan, meskipun belum standar akuntansi. Yakni perusahaan belum mencatat operasional harian secara rutin, pencatatan hanya berdasarkan proyek yang dikerjakan, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang dibuat hanya
<i>Iya belum karena kita hanya fokus untuk pembayaran pajak tahunan.. (K36)</i>	
<i>Sangat penting. karena ketika kita melakukan sebuah pengeluaran khususnya per SPK tadi dan misal kita tidak mencatat dengan teliti nanti kita</i>	

<i>tidak tahu ini keuntungan berapa dan pengeluarannya berapa nanti di akhir. (K47)</i>	untuk kepentingan pelaporan pajak.
<i>Sebenarnya jika SPK sebagai acuan kondisi keuangan perusahaan itu tidak. (A63)</i>	
<i>Karena, kita melakukan sebuah pengeluaran dan itu berguna untuk proses administrasi baik ke bank, maupun nantinya ke investor. (A75)</i>	

Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur dan isi laporan keuangan yang disusun CV. Karitama Jaya saat ini belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM. Secara umum, penyusunan laporan keuangan masih berorientasi pada kebutuhan administratif proyek dan pelaporan pajak tahunan, khususnya dalam konteks kerja sama dengan pihak pemerintah melalui Surat Perintah Kerja (SPK). Hal ini berdampak pada fokus pelaporan yang lebih bersifat proyek-spesifik dibandingkan entitas-spesifik. SAK EMKM sendiri mengatur penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) sebagai satu kesatuan yang menggambarkan aktivitas usaha secara keseluruhan dalam periode tertentu. Namun, dalam praktik di perusahaan, laporan yang disusun masih terbatas pada elemen-elemen dasar, dan lebih ditujukan untuk kepatuhan fiskal.

Laporan berbasis proyek dianggap sudah memadai untuk kebutuhan kontraktual, penggunaan SPK sebagai dasar laporan keuangan dinilai belum dapat menggambarkan kondisi keuangan entitas secara utuh. Hal ini juga diakui oleh informan bahwa SPK memiliki fungsi administratif yang penting, namun belum sepenuhnya mencerminkan kinerja keuangan keseluruhan perusahaan. Namun demikian, kesadaran akan

pentingnya pencatatan keuangan yang lebih terstruktur mulai tumbuh di lingkungan perusahaan. Informan menekankan bahwa pencatatan yang akurat dan sistematis sangat dibutuhkan, terutama untuk mengevaluasi hasil usaha serta mendukung kebutuhan eksternal seperti bank atau calon investor, yang menandakan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi yang lebih luas, meskipun belum dalam bentuk laporan yang sepenuhnya distandarkan. Dalam hal ini, terlihat bahwa laporan keuangan CV. Karitama Jaya memiliki peran administratif dan operasional, tetapi belum sepenuhnya digunakan untuk tujuan evaluasi strategis atau analisis kinerja jangka panjang sebagaimana ditekankan dalam kerangka pelaporan SAK EMKM.

Laporan keuangan yang disusun oleh UMKM idealnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, relevan, dan akuntabel. Dalam konteks CV. Karitama Jaya, penyusunan laporan keuangan sudah mulai dilakukan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Namun, diperlukan analisis lebih lanjut sejauh mana struktur dan isi laporan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SAK EMKM. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan perbandingan antara laporan keuangan aktual perusahaan dan struktur laporan keuangan menurut SAK EMKM, sebagai dasar untuk menilai relevansi dan kelayakan pelaporan yang telah disusun.

Tabel 4. 3 Perbandingan Struktur Laporan Keuangan CV. Karitama Jaya dan SAK EMKM

Aspek	CV. Karitama Jaya	SAK EMKM	Keterangan
Jenis Laporan	Laporan Laba Rugi dan Neraca dalam bentuk dasar	Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi	Sudah sesuai

Struktur Laporan	Tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan	Wajib mencantumkan dua laporan utama secara ringkas	Belum sesuai
Aset dan Kewajiban	Dicantumkan, namun klasifikasinya belum lengkap	Diklasifikasikan rinci: aset lancar, tetap, dll.	Belum sesuai
Pendapatan dan Beban	Dirinci cukup jelas menurut kategori	Harus dirinci secara sistematis sesuai kategori	Sudah sesuai
Periode Pelaporan	Per tahun pajak	Per tahun atau periodik	Belum sesuai
Format	Format Laporan pajak	Format SAK EMKM Halaman 41-45 (Draf SAK EMKM)	Belum sesuai

Berdasarkan perbandingan di atas, CV. Karitama Jaya telah menyusun dua jenis laporan utama yaitu laporan laba rugi dan neraca. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan signifikan jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM. Di antaranya adalah tidak adanya catatan atas laporan keuangan, klasifikasi aset dan kewajiban yang belum dirinci secara sistematis, serta format penyajian yang belum sesuai dengan struktur standar. Berdasarkan perbandingan di atas, laporan keuangan CV. Karitama Jaya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan SAK EMKM. Kekurangan utama terletak pada ketiadaan CaLK, klasifikasi aset dan kewajiban yang belum rinci, serta format penyajian laporan yang masih sederhana. Hal ini memperlihatkan bahwa laporan keuangan perusahaan lebih berfungsi sebagai dokumen administratif untuk pajak dan proyek, belum

untuk tujuan akuntabilitas menyeluruh. Berikut tabel triangulasi sumber dan triangulasi teknik pada hasil penelitian ini:

Fokus	Indikator	Direktur	Keuangan	Administrasi	Dokumen Pendukung	Hasil
Kesesuaian dengan SAK EMKM	Struktur Laporan Keuangan	Laporan keuangan yang kita buat hanya sebatas untuk pajak, jadi sesuai templet pajak saja.	Kami hanya menyusun laporan laba rugi dan neraca sesuai templet pajak apalagi CaLK	Kalau saya hanya mengurus dokumen SPK dan administrasi proyek, tidak pernah membuat laporan sesuai standar akuntansi.	Ditemukan laporan laba rugi sederhana dan neraca, tetapi tidak ada CaLK.	Laporan keuangan CV. Karitama Jaya belum sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Perusahaan hanya menyusun laba rugi dan neraca sederhana untuk keperluan pajak, tanpa CaLK dan klasifikasi aset serta kewajiban yang rinci.

Gambar 4. 6 Triangulasi Sumber Kesesuaian dengan SAK EMKM

Fokus	Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Hasil
Kesesuaian dengan SAK EMKM	Struktur Laporan Keuangan	Informan menyebut laporan keuangan disusun sederhana untuk kebutuhan pajak, hanya mencakup laba rugi dan neraca sederhana.	Tidak ditemukan laporan posisi keuangan lengkap maupun CaLK.	Dokumen berupa neraca dan laporan laba rugi sederhana tanpa rincian aset dan CaLK.	Laporan keuangan CV. Karitama Jaya belum sesuai dengan SAK EMKM, masih berfokus pada kebutuhan pajak tanpa membuat untuk kebutuhan administrasi perusahaan.

Gambar 4. 7 Triangulasi Teknik Kesesuaian dengan SAK EMKM

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan struktur laporan keuangan dengan SAK EMKM, diketahui bahwa CV. Karitama Jaya baru menyusun neraca sederhana dan laporan laba rugi, tanpa dilengkapi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Format dan klasifikasi yang digunakan juga belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku. Hasil triangulasi menunjukkan konsistensi temuan bahwa laporan keuangan perusahaan lebih berfungsi sebagai dokumen administratif dan perpajakan, belum untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan strategis sebagaimana ditekankan dalam SAK EMKM.

3. Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

Meskipun SAK EMKM disusun dengan prinsip penyederhanaan untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyusun laporan keuangan, namun implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks CV. Karitama Jaya, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang secara langsung

memengaruhi ketidakmampuan perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi tersebut secara optimal.

Tabel 4. 4 Kendala dalam Penyusunan Sesuai SAK EMKM

Wawancara	Analisis
<i>Belum pernah mendengar dan belum paham dengan SAK EMKM ini meskipun perusahaan ini di bawah asosiasi GAPENSI tidak mengetahui hal tersebut. (P12)</i>	Kendala utama dalam penerapan SAK EMKM di CV. Karitama Jaya masih terbatasnya pemahaman dan adaptasi terhadap pelaporan keuangan yang sesuai standar. Selama ini,
<i>Saya perlu dukungan dari device sebagai alat untuk membuat laporan keuangan. (A57)</i>	perusahaan cenderung menyusun laporan berdasarkan SPK per proyek saja, dan pencatatan
<i>Harus belajar dan memahami SAK ini karena kita benar-benar belum mengetahui standar ini dan khawatir terjadinya kesalahan. (P18)</i>	operasional harian belum dilakukan secara rutin. Selain itu, keterbatasan sarana seperti perangkat kerja juga menjadi tantangan tersendiri, ditambah
<i>Iya benar, tapi ini nantinya bisa diterapkan di perusahaan atau tidaknya ya, karena pasti memerlukan waktu untuk belajar dan memahami dalam pembuatan laporan keuangan sesuai standar ini (K45)</i>	belum adanya pengalaman langsung dalam menerapkan SAK EMKM. Meskipun ada minat dari pihak perusahaan untuk mulai menerapkan pelaporan yang lebih baik, kesiapan internal masih perlu diperkuat, terutama melalui pelatihan dan dukungan fasilitas yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, CV. Karitama Jaya menghadapi beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Salah satu kendala utama adalah

terbatasnya pemahaman terhadap SAK EMKM, karena belum pernah mengikuti pelatihan mengenai pencatatan laporan laba rugi untuk UMKM di mana sebagian informan menyatakan bahwa mereka belum mengenal atau belum memperoleh informasi yang memadai mengenai standar ini. Keterbatasan informasi ini berdampak pada pola pencatatan yang masih bersifat fungsional sesuai kebutuhan proyek. Pencatatan operasional belum dilakukan secara rutin, melainkan disesuaikan dengan kegiatan proyek yang sedang berlangsung. Selain itu kendala teknis juga turut menjadi faktor yang memengaruhi proses penyusunan laporan. Ketersediaan perangkat kerja atau teknologi pendukung menjadi salah satu hal yang dibutuhkan agar proses pencatatan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai standar. Tantangan lainnya adalah kebutuhan waktu dan proses untuk menyesuaikan diri terhadap standar. Adanya kekhawatiran akan potensi kesalahan dalam pelaporan menunjukkan bahwa perusahaan menyadari pentingnya pemahaman yang matang sebelum mengimplementasikan SAK EMKM secara menyeluruh. Berikut tabel triangulasi sumber dan triangulasi teknik pada hasil penelitian ini:

Fokus	Indikator	Direktur	Keuangan	Administrasi	Dokumen Pendukung	Hasil Observasi
Kendala Implementasi	Pemahaman SAK EMKM	Mengaku belum pernah mengikuti pelatihan SAK EMKM.	Menyatakan pencatatan hanya berdasar proyek, bukan standar.	Belum mengetahui isi SAK EMKM secara detail.	Tidak ada dokumen internal yang menjelaskan penerapan SAK EMKM.	Rendahnya pemahaman SAK EMKM menjadi hambatan utama.
	Keterbatasan Teknologi & SDM	Perangkat yang digunakan hanya <i>device</i> tanpa sistem akuntansi yang memadai.	Sulit menggabungkan laporan tiap proyek menjadi laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh	Fokus administrasi hanya pada dokumen proyek.	Arsip laporan keuangan masih manual, tidak terdigitalisasi menyeluruh.	Teknologi dan SDM terbatas menghambat penyusunan laporan sesuai standar.

Gambar 4. 8 Triangulasi Sumber Kendala Implementasi

Fokus	Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Hasil Observasi
Kendala Implementasi	Pemahaman SAK EMKM	Informan mengaku tidak pernah mendapat pelatihan dan sosialisasi terhadap SAK EMKM serta hanya memahami pencatatan sederhana untuk keperluan pajak.	Terlihat tidak ada praktik pencatatan rutin sesuai standar.	Tidak ditemukan catatan atau pedoman internal tentang SAK EMKM.	Rendahnya pemahaman SAK EMKM menjadi hambatan.
	Keterbatasan Teknologi & SDM	Informan menyebut pencatatan belum terdigitalisasi dan belum menggunakan sistem akuntansi untuk mempermudah pelaporan.	mekanisme pencatatan keuangan belum terdigitalisasi dan masih mengandalkan pencatatan manual, sehingga kurang mendukung penyajian laporan sesuai standar.	Arsip dokumen keuangan belum lengkap dan belum terstruktur sepenuhnya.	Proses pencatatan masih dilakukan secara manual dengan tenaga terbatas, sehingga penyusunan laporan sesuai standar belum optimal.

Gambar 4. 9 Triangulasi Teknik Kendala Implementasi

Berdasarkan temuan wawancara, observasi, dokumentasi, serta hasil triangulasi, dapat disimpulkan bahwa kendala utama implementasi SAK EMKM di CV. Karitama Jaya meliputi keterbatasan pemahaman akuntansi, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, pencatatan manual yang berbasis proyek, serta ketiadaan pelatihan dan dukungan teknologi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum sesuai dengan struktur SAK EMKM, dan masih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, khususnya pelaporan pajak dan administrasi kontrak. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas internal agar penerapan SAK EMKM dapat berjalan optimal.

C. Hasil Pembahasan

1. Praktik Penyusunan Laporan Keuangan CV. Karitama Jaya

CV. Karitama Jaya sebagai badan usaha di sektor jasa konstruksi skala kecil menunjukkan pola pelaporan keuangan yang masih berbasis proyek. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencatatan keuangan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari masing-masing proyek, dan belum dilakukan secara periodik atau menyeluruh atas seluruh aktivitas usaha. Laporan keuangan seperti laba rugi dan posisi keuangan hanya disusun untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sementara pencatatan transaksi operasional harian belum dicatat secara konsisten. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik pencatatan masih

menekankan pada pelaporan berbasis proyek dari pada pelaporan usaha secara menyeluruh.

Merujuk pada teori akuntansi keuangan, sistem pencatatan dan pelaporan seperti ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. SAK EMKM yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dirancang untuk entitas mikro, kecil, dan menengah agar mampu menyusun laporan keuangan yang sederhana namun informatif, terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha dalam menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya berguna bagi pihak eksternal atau lembaga keuangan, tetapi juga bagi pemilik usaha dalam mengambil keputusan strategis berbasis data keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik pelaporan seperti yang dilakukan oleh CV. Karitama Jaya juga banyak dijumpai di kalangan pelaku UMKM lainnya. Penelitian oleh Wahyuni & Wardani (2023) mengungkapkan bahwa pencatatan masih dilakukan secara manual dan sederhana karena keterbatasan pemahaman atas SAK EMKM. Penelitian oleh Safitri dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di UMKM Mawar Bakery belum menggunakan standar SAK EMKM dan baru berfokus pada pencatatan pengeluaran dan pendapatan produksi. Dan penelitian oleh Tatik dkk. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan SAK EMKM karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai manfaat dan cara penerapannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan di sektor UMKM, termasuk di bidang konstruksi seperti CV. Karitama Jaya, berada dalam proses adaptasi yang dinamis terhadap sistem pelaporan yang lebih terstruktur. Meskipun saat ini laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti perpajakan, terdapat potensi untuk memperluas fungsinya ke arah evaluasi kinerja usaha dan perencanaan keuangan jangka panjang. Penerapan prinsip-

prinsip dalam SAK EMKM dapat dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia, sehingga upaya penyempurnaan sistem pelaporan dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola usaha yang berkelanjutan.

2. Kesesuaian Laporan Keuangan CV. Karitama Jaya dengan Ketentuan yang Diatur dalam SAK EMKM

Laporan keuangan yang disusun oleh CV. Karitama Jaya belum sepenuhnya disusun dengan struktur pelaporan keuangan yang diatur dalam SAK EMKM. Penyusunan laporan saat ini lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kewajiban pelaporan pajak tahunan, karena sebagian besar kontrak kerja berasal dari instansi pemerintah yang mensyaratkan kelengkapan dokumen melalui Surat Perintah Kerja (SPK). Dengan itu, penyajian laporan keuangan cenderung diarahkan untuk mencerminkan biaya dan aktivitas pada masing-masing proyek, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Fungsi pelaporan dalam hal ini lebih difungsikan sebagai alat dokumentasi administratif dibanding sebagai sarana evaluasi strategis. Meskipun perusahaan telah menyusun laporan laba rugi dan neraca tahunan, belum ditemukan adanya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan unsur penting dari struktur pelaporan sesuai ketentuan SAK EMKM.

Perspektif teori akuntansi keuangan menempatkan SAK EMKM sebagai standar yang dirancang dengan pendekatan berbasis kas untuk memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh pengguna internal maupun eksternal (IAI, 2016). Standar ini mencakup tiga komponen utama, yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang disusun secara menyeluruh untuk menggambarkan kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Implementasi standar ini bergantung pada pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip dan tujuan pelaporan keuangan. Dalam hal ini CV.

Karitama Jaya, telah terdapat upaya untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis, meskipun penyajiannya masih dapat disempurnakan agar lebih selaras dengan struktur dan prinsip pelaporan yang diatur dalam SAK EMKM, khususnya terkait kelengkapan informasi dan klasifikasi akun yang lebih rinci.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa meskipun UMKM sering kali telah menerapkan beberapa aspek standar akuntansi, kesesuaian penuh dengan SAK EMKM masih bervariasi. Penelitian Nurazizah dan Zulkarnain (2022) menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran seluruh komponen laporan keuangan sudah sesuai SAK EMKM, dan laporan laba rugi juga telah disusun sesuai standar. Namun, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan belum sepenuhnya disiapkan, serta penyajian aset keuangan dan ekuitas masih belum sesuai. Senada dengan itu, penelitian Arrafi & Arsjah (2025) menemukan bahwa pencatatan keuangan masih belum terstruktur secara menyeluruh sesuai SAK EMKM, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang bersifat menyeluruh seperti neraca dan catatan atas laporan keuangan, meskipun pencatatan berbasis kas sudah sejalan dengan pendekatan yang dianjurkan. Kondisi ini sejalan dengan situasi di CV. Karitama Jaya, di mana laporan keuangan tahunan lebih difokuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakan daripada untuk analisis bisnis internal yang mendalam, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan dan performa usaha secara utuh.

CV. Karitama Jaya masih berada dalam tahap awal transisi menuju pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Meskipun telah ada usaha menyusun laporan laba rugi dan neraca, ketidaksesuaian dalam klasifikasi aset dan kewajiban, serta belum adanya CaLK menunjukkan bahwa struktur laporan masih belum memenuhi prinsip dasar standar. Perbandingan terhadap ketentuan SAK EMKM menunjukkan adanya kesenjangan signifikan, baik dari sisi isi, format

penyajian, maupun tujuan pelaporan. Transformasi ini penting agar laporan keuangan tidak hanya menjadi alat kepatuhan fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan jangka panjang.

3. Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

CV. Karitama Jaya menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan SAK EMKM. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman terhadap isi dan struktur SAK EMKM. Para informan mengungkapkan bahwa mereka belum memperoleh informasi atau pelatihan yang memadai mengenai standar ini. Akibatnya, praktik pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan lebih bersifat fungsional dan berbasis proyek misalnya, hanya mencatat pengeluaran atau pemasukan terkait proyek yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan prinsip akuntansi yang relevan dan andal, karena belum disusun secara periodik dan tidak mencerminkan posisi keuangan serta kinerja usaha secara keseluruhan.

Perspektif teori akuntansi keuangan, SAK EMKM dirancang sebagai bentuk penyederhanaan sistem pelaporan keuangan yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti periodisasi, pengakuan berbasis kas, dan kewajiban penyajian informasi. Menurut Dechow & Dichev (2002) kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mencatat dan menyajikan informasi akuntansi secara akurat agar relevan bagi pengambilan keputusan. Dalam hal ini pencatatan dilakukan berdasarkan kebutuhan proyek atau aktivitas tertentu, maka hal tersebut perlu dilihat lebih lanjut apakah telah memenuhi prinsip periodisasi, yaitu penyusunan laporan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi SAK EMKM, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat disesuaikan

dengan praktik pencatatan yang ada, sehingga proses penyusunan laporan tetap selaras dengan karakteristik operasional perusahaan.

Dukungan sarana dan prasarana pencatatan menjadi aspek penting dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur. Beberapa informan menyampaikan bahwa perangkat lunak akuntansi atau teknologi informasi sederhana belum sepenuhnya digunakan dalam pencatatan operasional harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pencatatan masih dijalankan secara konvensional, yang memerlukan ketelitian lebih tinggi dalam pengelompokan transaksi. Keberadaan infrastruktur teknologi dapat berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan secara efisien dan sistematis. Di sisi lain, munculnya kekhawatiran terhadap potensi kesalahan dalam pelaporan juga menjadi pertimbangan internal, terutama ketika belum ada pemahaman yang menyeluruh terhadap isi standar. Oleh karena itu, aspek kesiapan organisasi, baik dari segi pemahaman, proses adaptasi, maupun penggunaan teknologi, menjadi bagian penting dalam mendukung proses transisi menuju pelaporan yang mengacu pada standar akuntansi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi SAK EMKM pada UMKM sering kali mengalami kendala baik dari sisi pemahaman maupun kesiapan teknis. Pada penelitian oleh Nurhaliza (2024) menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi SAK EMKM adalah rendahnya tingkat pemahaman terhadap standar tersebut, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pencatatan keuangan, serta minimnya sosialisasi atau pelatihan dari pihak terkait sehingga pencatatan laporan keuangan cenderung disesuaikan dengan pemahaman pemilik usaha. Sementara itu, penelitian oleh Erika & Suantha (2025) menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan masih sangat sederhana, hanya mencakup arus kas masuk dan keluar tanpa klasifikasi akun, dan kurangnya pemahaman akan manfaat laporan keuangan berdampak

pada belum teratur dan keterbatasan dalam sistem pencatatan. Penelitian ini mempertegas bahwa baik aspek pengetahuan maupun sarana teknis menjadi kendala nyata dalam penerapan SAK EMKM yang juga ditemukan dalam konteks CV. Karitama Jaya. Oleh karena itu, penyesuaian bertahap terhadap praktik pencatatan, penguatan pemahaman terhadap standar, serta peningkatan penggunaan teknologi yang sesuai menjadi hal penting dalam mendukung pelaporan keuangan yang lebih sistematis dan sesuai standar.

Dengan mempertimbangkan kendala-kendala tersebut, bahwa hambatan utama dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM di CV. Karitama Jaya berasal dari keterbatasan pemahaman, serta belum adanya kesadaran akan pentingnya sistem pelaporan keuangan yang terstandar. Tanpa penanganan yang menyeluruh, kondisi ini dapat menghambat potensi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan, menjalin kerja sama bisnis, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.